



## SIKAP DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SMK NEGERI 2 KOTA TERNATE

<sup>1</sup>Irwan Abbas, <sup>2</sup>Ariani Djurumudi

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unkhair

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP  
Unkhair

Email: [arianidjurumudi@gmail.com](mailto:arianidjurumudi@gmail.com), [irwanabbas@unkhair.ac.id](mailto:irwanabbas@unkhair.ac.id)

Diterima : 19-07-2020

Direvisi : 10-09-2020

Dipublikasi : 04-10-2020

**Abstrak.** Latar belakang penelitian ini adalah Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis, karena sikap demokratis sangat diperlukan bagi masyarakat saat ini. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga dan bangsa atas ide, cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat yang demokratislah dimungkinkan warga dan bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran guru dalam Sikap Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kota Ternate. 2. Untuk mengetahui implementasi Pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kota Ternate. Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat dalam mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian ini adalah seluruh Guru PPKn, wakasek kurikulum, kepala sekolah, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1. Sikap demokratis sangatlah diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama serta kelompok-kelompok sosial. Keberagaman ini merupakan suatu keniscayaan hidup, karena setiap orang ataupun kelompok pasti memiliki perbedaan yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi kelompok-kelompok sosial dengan pemikiran dan pendapat yang berbeda. 2. Implementasi sikap demokrasi yang diharapkan selain melalui kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif, strategi atau metode pembelajaran yang digunakan juga melalui keteladanan yang baik dari perilaku guru.

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas tidak lepas dari peran guru. Dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar.

**Kata Kunci :** *Sikap Demokrasi, Pembelajaran PPKn*

#### **Abstract**

The background of this research is that education must be able to give birth to democratic humans, because democratic attitudes are very necessary for society today. The life of a democratic society must be based on the awareness of citizens and the nation of ideas, democratic ideals that give birth to the awareness and belief that only in a democratic society is it possible for citizens and nations to maximize prosperity and mutual freedom. The purpose of this study is 1. To find out the role of teachers in Democratic Attitudes in Learning PPKn in SMK Negeri 2 Ternate City. 2. To find out the implementation of PPKn Learning at SMK Negeri 2 Ternate City. Research subjects are people who are asked to provide information about a fact or opinion in expressing the facts in the field. The subjects of this study were all PPKn teachers, vice principal of Kurikulum, school principals, and students. Data collection techniques used observation, interviews, and study documentation. The results of this study are 1. Democratic attitude is very necessary in social life, because Indonesia has a diversity of ethnic, cultural, linguistic, religious and social groups. This diversity is a necessity of life, because every person or group must have diverse differences. This diversity is a challenge for Indonesia, especially for social groups with different thoughts and opinions. The implementation of democratic attitudes is expected not only through more creative learning activities, learning strategies or methods used also through good role models of teacher behavior. The implementation of democratic values in the learning process of Citizenship Education in the classroom cannot be separated from the role of the teacher. By giving students the broadest opportunity to learn.

**Keywords:** *Democratic Attitudes, PPKn Learning*

## A. PENDAHULUAN

Sikap demokratis sangatlah diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama serta kelompok-kelompok sosial. Keberagaman ini merupakan suatu keniscayaan hidup, karena setiap orang ataupun kelompok pasti memiliki perbedaan yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi kelompok-kelompok sosial dengan pemikiran dan pendapat yang berbeda. Berbagai perbedaan dan keanekaragaman yang ada dalam masyarakat kalau dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan bagi masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur, sejahtera yang dilandasi dengan keadilan dan keberadaban (Zamroni, 2013:97). Penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada bisa menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui sekolah (Azra, 2002:157). Melalui pendidikan, generasi muda bisa membentuk dan menumbuhkan kembangkan sikap demokratis untuk diterapkan dalam kehidupan.

Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis, karena sikap demokratis sangat diperlukan bagi masyarakat saat ini. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga dan bangsa atas ide, cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat yang demokratislah dimungkinkan warga dan bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan bersama. Namun, banyak sekali masyarakat kurang menerapkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Kenyataannya, generasi muda khususnya siswa banyak yang tidak mengerti bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi. Pentingnya penerapan nilai demokrasi ini sangat membantu dalam menumbuhkan dan membentuk kehidupan demokrasi, karena sistem demokrasi di Indonesia belum memumpuni sehingga dibutuhkan masyarakat yang dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki sistem demokrasi sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut diperlukan suatu upaya atau proses pendidikan demokrasi yang sungguh-sungguh, mengingat bahwa Indonesia memiliki latar belakang sistem pemerintahan kerajaan yang berbeda dengan sistem demokrasi. Oleh karena itu, dalam membentuk suatu masyarakat demokratis, diperlukan penyelenggaraan pendidikan demokrasi yang terus-

menerus dan berkesinambungan baik melalui lembaga persekolahan maupun lembaga kemasyarakatan, karena “demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya” (Branson, 1999).

Sedikitnya ada dua tantangan yang cukup berat untuk membentuk masyarakat demokratis di Indonesia. Pertama, tantangan historis, ialah tantangan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kehidupan masyarakat yang bersistem kerajaan dan penjajahan. Suatu proses mengubah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dari budaya masyarakat yang telah lama berkehidupan secara feodalistis ke masyarakat demokratis. Kedua, mempertahankan dan memelihara budaya, masyarakat dan warga negara yang sedang belajar menjalankan kehidupan demokratis agar secara berkesinambungan ditransformasikan kepada generasi berikutnya (Wahab & Sapriya, 2011:42). Karena pada hakikatnya masyarakat memerlukan kehidupan demokrasi yang harus dikembangkan agar dapat selaras dengan tujuan hidup bangsa dan negara, yakni kehidupan yang demokratis dan juga realistis. Generasi muda khususnya remaja dan pelajar, mengalami kemerosotan nilai-nilai demokrasi. Terlihat dari berbagai kejadian dan perilaku yang sering dijumpai di media massa. Fenomena tersebut dapat dilihat dengan adanya perkelahian antar pelajar, demokrasi yang anarkis, dan sikap otoriter para pemimpin (Nur Chayati, 2015:4). Seharusnya pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa harus sudah memiliki sikap demokratis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa negara ini merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Sehingga siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah harus mengerti dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demokrasi dan menjadi warga negara yang cerdas dan juga berkarakter. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi pada siswa, yaitu melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang harus dimaksimalkan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang demokratis, memiliki karakter dan juga mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang menunjang agar dapat menumbuhkembangkan karakter dan nilai-nilai demokratis pada siswa di sekolah. Siswa harus bisa membentuk sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kelas, di organisasi maupun kegiatan di luar sekolah. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sikap Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kota Ternate”

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran guru dalam Sikap Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kota Ternate?
- 2) Bagaimana penerapan Pembelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Kota Ternate?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menyangkut Membentuk Sikap Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKN DI SMK Negeri 2 Kota Ternate. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan). Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Ternate. Alasan peneliti melaksanakan penelitian masih banyak peserta didik yang tidak memahami demokrasi dengan baik. Bertumpuh pada hal ini, maka peneliti melakukan penelitian yang mana tidak dipisahkan oleh waktu. Peneliti melakukan akan dilaksanakan selama dua bulan. Secara Umum metode diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan jumlah dan kegunaan tertentu. Sedangkan metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses berpikir.

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat dalam mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian ini adalah seluruh Guru PPKn, wakasek kurikulum, kepala sekolah, dan siswa. (Moleong, 2007:52).

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan metode-metode sebagai berikut: Observasi. Yaitu pengambilan atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara. Yaitu pengumpulan data metode wawancara atau tanya jawab secara langsung dan mendalam Guru PPKn, wakasek kurikulum, kepala sekolah, dan siswa yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dengan menggunakan panduan wawancara. (Sugiyono: 2010). Dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat data berupa dokumentasi atau arsip. (Sugiyono: 2010)

Analisis data penelitian kualitatif merupakan kajian untuk mengenal struktur fenomena yang diteliti. Analisis mengarah pada upaya menelaah permasalahan-permasalahan dengan teori atau pendapat ahli yang relevan. Analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutka data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang telah disarankan oleh data.(1). Redukasi yang diperoleh peneliti dilapangan terlalu banyak dan semakin mendalam, maka perlu direduksi dengan mengklasifikasikan data-data tersebut secara jelas dan menyusun secara sistematis untuk dapat diperjelas data yang digunakan dan yang tidak dapat digunakan, (2).Display data (penyajian data).Yaitu data-data yang telah dikumpulkan dapat diurutkan secara jelas dan diuraikan secara singkat untuk memperjelas bentuk dan fungsi data, atau dibentuk berupa bagan dan hubungan antara kategori dan sejenisnya, dan lebih jelas lagi dibuat dalam bentuk teks yang bersifat naratif. (3).Membuat kesimpulan. Setelah data dianalisa dengan jelas maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan pertama merupakan kesimpulan yang tidak mutlak, oleh karena dalam penelitian ini kesimpulan akan berkembang seiring dengan perkembangan dan penelitian yang ditemukan. (Moleong, 2007:71)

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Membentuk Sikap Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKN**

Dalam penerapan sikap demokrasi siswa sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari kehidupan di sekolah dalam pembelajaran disaat ada teman yang berbicara mereka selalu mendengarkan dalam berdiskusi dan sudah mampu saling menghargai berpenbedaan pendapat diantara mereka.Salah satu penerapan demokrasi di lingkungan sekolah ialah pemilihan ketua kelas, dimana pemilihan tersebut bisa dilakukan secara musyawarah atau voting yang dipimpin oleh seorang guru.Bukan hanya pemilihan ketua kelas saja, namun pemilihan ketua lainnya juga bisa dilakukan secara musyawarah seperti pemilihan ketua OSIS, pengurus kelas, ketua kegiatan, dan lain sebagainya.

#### **b. Implementasi Sikap Demokrasi Pembelajaran PPKN**

Nilai-nilai demokrasi dinilai berhasil apabila siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi misalnya toleransi, berani mengemukakan pendapat, dan menghargai perbedaan pendapat siswa lain terutama di dalam kelas.Nilai demokrasi akan muncul dan berkembang pada diri siswa apabila memiliki sikap positif terhadap nilai demokrasi dan terbiasa melakukannya. Cara yang dilakukan oleh guru dalam membimbing dan menyampaikan materi pelajaran untuk pemahaman siswa, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, dari hasil diskusi kelompok tersebut masing-masin siswa mempersiapkan diri untuk mengemukakan pendapatnya,dengan

menggunakan metode pembelajaran tersebut siswa memiliki keaktifan, kerjasama dalam kelompok, dan kepercayaan diri untuk mengemukakan pendapat.

### **1. Pembentukan Sikap Demokratis**

Sikap demokratis dapat dibentuk jika terdapat komponen-komponen pendukungnya. Seperti yang dikemukakan oleh Cipto (Taniredja, 2013:140) bahwa sikap demokratis dapat terbentuk apabila terdapat nilai-nilai demokrasi sebagai berikut:

- a. Kebebasan Menyatakan Pendapat
- b. Kebebasan Berkelompok
- c. Kebebasan berpartisipasi
- d. Kesetaraan Antar Warga
- e. Rasa Percaya
- f. Kerja Sama

### **2. Pengertian Pembelajaran PPKn**

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara yaitu Pancasila. Menciptakan proses pembelajaran PPKn yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inspiratif, interaktif, dalam pembelajaran PPKn tidaklah mudah. Sebagian besar siswa masih menganggap mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang hanya mementingkan hafalan saja. Guru dalam proses pembelajaran hanya menuntut kemampuan kognitif siswa saja. Hal ini ditegaskan oleh Sanjaya (2006:1) bahwa proses pembelajaran siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, tanpa dituntut untuk memahami informasi yang di ingatnya sehingga siswa kaya akan ilmu tetapi kurang dalam implementasinya.

### **3. Tujuan PPKn**

Pembelajaran pasti memiliki tujuan agar tercapainya kehendak yang di inginkan, dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdapat tujuan-tujuan tertentu untuk peserta didik. Menurut John. J. Patrick (dalam Sartika, 2018:7) konsep pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang efektif untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis mencakup empat komponen dasar sebagai berikut:

- a. Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi. Komponen pertama ini mengajarkan konsep-konsep dan implementasi demokrasi yang mencakup konsep demokrasi (minimal), konstitusionalisme, hak-hak warganegara, kewarganegaraan, *civil society* (masyarakat madani) dan ekonomi pasar.

- b. Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis yang ditujukan agar dapat memberdayakan warganegara supaya memiliki kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menjelaskan informasi dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah publik dan menentukan dan mempertahankan keputusan tentang masalah-masalah tersebut.
- c. Keterampilan partisipatori warga negara yang demokratis dimaksudkan untuk dapat memberdayakan warganegara agar mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik dan memiliki tanggungjawab terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan. Kombinasi keterampilan kognitif dan keterampilan partisipatori dapat dijadikan sarana bagi warganegara berpartisipasi secara efektif untuk memajukan kepentingan umum dan personal serta mempertahankan hak-hak mereka. Pengembangan keterampilan kognitif dan partisipatori membutuhkan agar siswa belajar secara intelektual di dalam maupun diluar kelas.

#### **4. Ruang Lingkup PPKn**

Dalam pembelajaran PPKn, ada aspek-aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam ruang lingkungannya. Menurut Ubaedillah & Rozak (2013:19) menyebutkan materi pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) terdiri dari tiga materi pokok, yaitu demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*civil society*). Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005 tentang ruang lingkup pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai standar nasional yang termuat dalam standar isi, mengemukakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran PPKn sebagai berikut (Wahab & Sapriya, 2011:329):

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun, bangsa sebagai bangsa Indonesia, dan partisipasi dalam bela negara.
- b. Norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- c. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong dan persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa, kecamatan daerah, dan pusat.
- g. Kedudukan Pancasila, meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- h. Globalisasi, meliputi politik luar negeri Indonesia di era globalisasi dan dampak globalisasi.

## 5. Karakteristik PPKn

Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson (1998:5) harus mencakup tiga komponen, yaitu *civic knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), *civic skills* (Keterampilan Kewarganegaraan), dan *civic disposition* (Watak Kewarganegaraan). Komponen pertama, *civic knowledge*“ berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara”. Kedua, *civic skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ketiga *civic disposition*, komponen yang merupakan dimensi paling substansif dan esensial dalam mata pelajaran PPKn. *Civic disposition* dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi diatas. Dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan mata pelajaran PPKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan adanya penguatan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi sikap demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya terkait materi yang disampaikan oleh guru. Guru mengajarkan pada siswa untuk bersikap demokratis, sehingga siswa mampu menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Guru harus selalu memberikan pemahaman pada siswa akan nilai-nilai demokrasi sehingga mampu untuk mengepresikan kemampuan siswa. Guru selalu memberikan kebebasan demokrasi pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, Meta. 2013. *Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Fungsi Media Massa Terhadap Wawasan Kebangsaan*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 1. No 9.
- Cipta Aryani, Ine Kusuma & Markum Susatim. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Azra, Azyumardi. 2015. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenamedia.
- Destikasari, Rizki. 2016. *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa (Studi Analisis Deskriptif di SMK Wiworotomo Purwokerto)*. Bachelor Thesis.
- Diarsih, Kadek. 2015. *Pengaruh Partisipasi Pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah Terhadap Sikap Demokratis Siswa*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 3. No 4.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press
- Murdiono, Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Pratiwi, Evika. 2016. *Upaya Guru dalam Membentuk Sikap Demokratis pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Putra Idhata Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol 4. No 3.
- Sanjaya, Wina. 2007. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Saputra, Trio. 2017. *Peranan Forum Pendidikan dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Sikap Demokratis Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 5. No 6.
- Sartika, Meri. 2018. *Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menginternalisasi Nilai-nilai Demokrasi*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol 5. No 10.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, Rini Puji. 2016. *Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan Model Project Citizen terhadap Sikap Nasionalisme dan Partisipasi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. Tesis Ilmu Sosial: Kewarganegaraan dan Hukum.
- Supangat, Muhammad Halimi. 2017. *Pembudayaan Demokrasi di Pesantren dalam Mengembangkan Civic Disposition Santri*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 2. No 1.
- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Wahab, Abdul Aziz & Sapriya. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Winataputra, Udin Saripudin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Ombak